

# **DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU**

**Oleh : Deny Setiawan dan Lapeti Sari**

## **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 2009 dan 2010. Untuk memperoleh jawaban objektif penelitian, maka metode analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata laju pertumbuhan dana transfer (Dana Perimbangan).*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disentralisasi fiskal mampu membawa tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi beberapa Kabupaten di Provinsi Riau seperti Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini disebabkan di Kabupaten-kabupaten tersebut terdapat sumber minyak dan gas. Untuk Kabupaten-kabupaten yang tidak mempunyai sumber minyak dan gas masih pertumbuhan ekonomi masih di topang oleh sector pertanian dan perkebunan.*

*Keyword : Pertumbuhan ekonomi, dan desentralisasi fiskal*

## **A. PENDAHULUAN**

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu hasil studi desentralisasi fiskal seringkali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama diantara para peneliti dan peminat desentralisasi. Ada silang pendapat dengan masing-masing pihak memiliki argumentasi logis serta telah membuktikannya secara empiris. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hasil studi dari beberapa ahli seperti Davoodi dan Zou (1998) serta Woller dan Phillips (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Lebih jauh, Zhang dan Zou (1998) serta Xie, et all (1999) mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurang mengantungkan bagi pembangunan.

Sebaliknya, hasil studi Iimi (2005) dan Malik dkk (2006) menunjukkan hasil berbeda, yakni bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Atas fenomena ini, Breuss dan Eller (2004) menyatakan bahwa ada efek ambivalent dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga sulit untuk menarik rekomendasi yang tepat tentang bagaimana desentralisasi yang optimal. Lebih lanjut Breuss dan Eller menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan, atau hubungan otomatis desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian Hidayat (2005) berpendapat bahwa persoalan desentralisasi sesungguhnya belum mencapai suatu titik akhir. Perbedaan tersebut bukan berarti bahwa studi tentang desentralisasi sedang mengalami krisis. Ini adalah suatu proses untuk menemukan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan aplikatif. Secara implisit ini berarti tantangan bagi pendukung desentralisasi untuk terus melakukan studi eksplorasi. Menurut Vazquez dan McNab (2001) agenda yang belum terselesaikan dalam teori dan praktek tentang desentralisasi fiskal adalah untuk memahami bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi sasaran-sasaran ekonomi tradisional meliputi efisiensi ekonomi, keadilan fiskal secara horizontal, dan stabilitas ekonomi makro. Secara prinsipil, munculnya gagasan tentang desentralisasi merupakan suatu antithesis atas struktur politik yang sentralistis. Dengan kata lain, karena struktur politik yang sentralistis cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005). Lebih jauh, mengutip pendapat Allen, Kuncoro (2004) menyatakan bahwa timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di Negara dunia ketiga. Perhatian terhadap desentralisasi fiskal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya terbatas terhadap negara-negara berkembang, tetapi juga muncul dan menjadi agenda utama banyak negara-negara OECD (Vazquez dan McNab, 2001). Dalam konteks Negara berkembang, mengutip pendapat Smith, Hidayat (2005) menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar Negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Senada dengan itu Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepattercapai. Di Indonesia desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini memberikan kewenangan kepada daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Bagian yang menjadi urusan Pemerintah Pusat hanya meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, serta Agama.

Meskipun begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Hal ini sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, hanya desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antardaerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Pada masa orde baru, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan pemerintah dengan dibarengi dengan kontrol yang ketat terhadap militer dan birokrasi, sehingga pada akhirnya relasi pusat-daerah periode orde baru lebih cenderung bergerak ke arah kutub sentralisasi dari pada kutub desentralisasi. Menurut Jakti dalam Hidayat (2005) setidaknya ada dua alasan utama mengapa rezim orde baru cenderung melakukan sentralisasi kekuasaan. *Pertama*, secara politis, hal itu berkaitan dengan menciptakan stabilitas politik dan ketahanan nasional yang kuat. *Kedua*, dalam dimensi ekonomi, sentralisasi kekuasaan tersebut berkaitan dengan kehadiran model neo-keynesian yang telah dijadikan landasan konseptual oleh para teknokrat dalam mendesain kebijakan pembangunan ekonomi orde baru. Era baru Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Proses pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yakni UU no. 32 tahun 2004 mengganti UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU no. 33 tahun 2004 mengganti

UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD). Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua UU ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, maupun hubungan secara horisontal antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat pusat maupun Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pada awal desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan.

## **B. METODELOGI**

### **1. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 2009 dan 2010.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data utama yang digunakan dalam kajian ini ialah data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga/instansi seperti Bappeda, dan BPS. Selain itu dari sumber-sumber publikasi resmi yang lain, seperti buku-buku laporan pembangunan, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan sebagainya.

### **3. Metode Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian tinjauan (*explorative*) yang dalam pernyataan masalah tidak memiliki hipotesis dan analisis eksplanasi (*explanation analytical*) yang menguraikan berbagai hubungan antara variabel. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;

Rumus menghitung pertumbuhan PDRB:

$$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$$

Dimana:

- $t+1$  = tahun pengamatan PDRB  
 $t$  = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

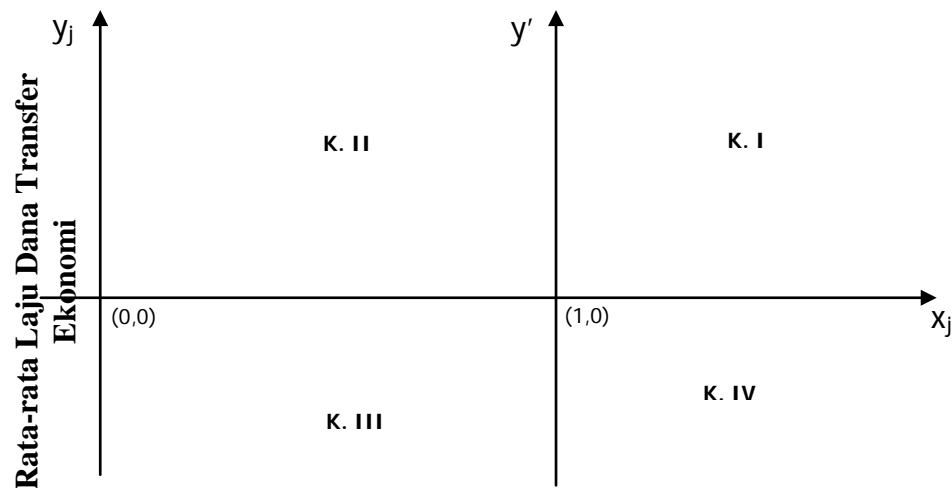
Untuk mengetahui struktur perekonomian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{PDRB}_{(i)}}{\text{Total PDRB}_{(t)}} \times 100\%$$

Dimana:

- PDRB  $i$  = PDRB sektor tertentu misalnya pada sektor pertanian  
 Total PDRB  $t$  = Total PDRB pada tahun pengamatan

Untuk memperoleh jawaban objektif penelitian, maka metode analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata laju pertumbuhan dana transfer (Dana Perimbangan). Bidang datar ( $x$ ) menggambarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan bidang tegak lurus ( $y$ ) menggambarkan rata-rata laju pertumbuhan dana transfer.



**Rata-rata pertumbuhan ekonomi Riau**

Pengelompokan masing-masing kuadran adalah sebagai berikut:

- I. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Riau.
- II. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Riau.
- III. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata Riau.
- IV. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata Riau namun ekonomi di dibawah rata-rata Riau.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2005-2009

Tabel 1 dibawah ini menunjukkan angka-angka yang menggambarkan Pertumbuhan Ekonomi Riau Tahun 2005-2009 berdasarkan harga konstan.

Tabel 1 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Termasuk Minyak Bumi dan Gas 2005-2009 (Juta Rupiah/*Million Rupiahs*)

Lapangan usaha <i>Industrial origin</i>	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	13 308 660,62	14 103 047,84	14 785 911,40	15 494 292,46	16 057 909,33
2. Pertambangan dan penggalian <i>Mining and quarrying</i>	43 906 875,82	45 183 667,56	45 125 692,40	46 897 464,66	46 886 568,83
3. Industri pengolahan <i>Manufacturing indus tries</i>	7 972 127,07	8 512 386,69	9 246 973,72	9 910 769,31	10 393 684,28
4. Listrik, gas dan air bersih <i>Electricity, gas and water supply</i>	165 499,00	175 200,34	185 050,79	197 745,09	203 742,59
5. Bangunan <i>Construction</i>	2 212 679,83	2 395 732,42	2 674 930,31	2 972 880,21	3 229 281,23

Lapangan usaha <i>Industrial origin</i>	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
6. Perdagangan, hotel dan restoran <i>Trade, hotel and restaurant</i>	5 641 815,35	6 278 665,89	6 840 260,85	7 504 882,30	8 159 566,95
7. Pengangkutan dan komunikasi <i>Transportation and communication</i>	1 982 655,81	2 173 442,62	2 331 648,28	2 575 353,68	2 784 295,82
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan <i>Finance, rent of buildings, business services</i>	771 841,96	892 826,69	1 011 841,54	1 149 980,23	1 264 903,24
9. Jasa-jasa <i>Services</i>	3 325 431,29	3 655 897,19	4 010 950,18	4 382 013,88	4 749 521,19
<b>Jumlah / Total</b>	<b>79 287 586,75</b>	<b>83 370 867,24</b>	<b>86 213 259,46</b>	<b>91 085 381,81</b>	<b>93 729 473,47</b>

a.

Catatan / Note: \*) Angka Perbaikan/*Revised Figures* \*\*) Angka Sementara / *Preliminary Figures*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar harga konstan tahun 2000 pada triwulan II tahun 2009 mencapai Rp. 23.495,5 milyar, dan jika mengabaikan unsur migas maka besaran PDRB Riau atas dasar harga konstan 2000 menjadi sebesar Rp. 11.125,8 milyar. Pertumbuhan ekonomi (dengan migas) yang digambarkan oleh pertumbuhan nilai PDRB pada triwulan II tahun 2009 mencapai 3,07 persen dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (*y-on-y*), sedangkan tanpa migas perekonomian Riau tumbuh sebesar 6,43 persen. Pertumbuhan ekonomi sektoral atau menurut lapangan usaha pada triwulan II tahun 2009 didorong oleh pertumbuhan di semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 11,76 persen, namun hanya menyumbang 0,14 persen terhadap total pertumbuhan. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran meskipun tumbuh 8,02 persen, ternyata sanggup memberikan sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,66 persen.



Tabel 2 : Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Riau Menurut Lapangan Usaha (Dengan Migas) Triwulan II 2009 dan Semester I 2009 (%)

Lapangan	Tr II w 2009 Thd TriI 2008 (y on	Sumber Pertumb an (y on	Tr w II 2009 thd TriI 2009 (q to q)	Sumber Pertumb an (q to	Semester I thd Semester 2008 (c to c)	Sumber r Pertumb an (c to c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,14	0,53	3,07	0,52	3,12	0,53
2. Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,22	3,82	1,93	1,60	0,83
3. Industri Pengolahan	5,82	0,61	1,30	0,14	5,59	0,60
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,87	0,01	0,32	0,00	5,23	0,01
5. Bangunan	8,21	0,26	3,36	0,11	8,75	0,28
6. Perdagangan, Hotel, dan Rekreasi dan Perawatan	8,02	0,66	2,81	0,24	7,99	0,66
7. Transportasi dan Komunikasi	8,64	0,24	1,11	0,04	9,28	0,26
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	11,7	0,14	0,92	0,01	11,9	0,14
9. Jasa- Jasa	8,63	0,40	0,67	0,04	8,95	0,42
<b>PDRB</b>	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>

Pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas pada triwulan II tahun 2009 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ( $q-to-q$ ) tumbuh sebesar 3,03 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,82 persen dan menjadi sumber pertumbuhan utama yakni sebesar 1,93 persen. Sektor bangunan tumbuh 3,36 persen dan menyumbang 0,11 persen terhadap total pertumbuhan. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,07 persen dan menyumbang 0,52 persen terhadap total pertumbuhan.

Tabel 3 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Riau Menurut Lapangan Usaha (Tanpa Migas) Triwulan II 2009 dan Semester I 2009 (Persen)

Lapangan	Tr II w 2009 Thd TriI 2008 (y on	Sumber Pertumb an (y on	Tr w II 2009 thd TriI 2009 (q to q)	Sumber Pertumb An (q to	Semester I thd Semester 2008 (c to c)	Sumber Pertumb an (c to c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,14	1,16	3,07	1,09	3,12	1,15
2. Pertambangan dan Penggalian	15,51	0,27	2,65	0,05	15,68	0,28
3. Industri Pengolahan	7,37	1,27	0,90	0,16	7,07	1,,23
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,87	0,02	0,32	0,00	5,23	0,03
5. Bangunan	8,21	0,57	3,36	0,23	8,75	0,60
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,02	1,43	2,81	0,51	7,99	1,42
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,64	0,52	1,11	0,07	9,28	0,56
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	11,7	0,31	0,92	0,03	11,9	0,32
9. Jasa- Jasa	8,63	0,88	0,67	0,07	8,95	0,91
PDRB	6,43	6,43	2,21	2,21	6,49	6,49

Apabila mengabaikan faktor migas dalam penghitungan PDRB Riau, pertumbuhan ekonomi Riau (*y-on-y*) sebesar 6,43 persen seperti terlihat pada Tabel 2. Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi berada pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,51 persen, diikuti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 11,76 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi 8,64 persen, sektor jasa-jasa 8,63 persen, sektor bangunan tumbuh 8,21 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,02 persen. Walaupun sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan, sumbangan pertumbuhannya hanya sebesar 0,27 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi justru berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,43 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan 1,27 persen, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 1,16 persen, sektor jasa-jasa 0,88 persen dan sektor bangunan 0,57 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas pada triwulan II tahun 2009 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*)

tumbuh sebesar 2,21 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 3,36 persen, dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 3,07 persen. Sementara pertumbuhan sektorsektor lainnya dibawah 3,00 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi diberikan oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 1,09 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 0,51 persen dan sektor bangunan sebesar 0,23 persen.

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan berkurang kontribusinya dari 20,20 persen menjadi 19,18 persen atau berkurang sekitar 1,02 persen. Sementara kontribusi sektor pertambangan dan penggalian berkurang dari 43,05 persen menjadi 42,74 persen.

Tabel 4 : Struktur PDRB Riau Menurut Lapangan Usaha (Dengan Migas) Triwulan II 2008 – 2009 dan Semester I 2008 – 2009 (Persen)

Lapangan Usaha	Trw II 2008	Trw II 2009	Semester I 2008	Semester I 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	20,20	19,18	20,04	18,46
2. Pertambangan dan Penggalian	43,05	42,74	44,00	43,96
3. Industri Pengolahan	18,35	18,83	17,96	18,62
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,18	0,17	0,18	0,17
5. Bangunan	4,23	4,48	4,05	4,32
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7,08	7,72	6,98	7,67
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,89	1,79	1,87	1,78
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Dagangan	1,70	1,99	1,71	1,99
9. Jasa - Jasa	3,32	3,10	3,21	3,03
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00
Nilai PDRB (Rp Milyar)	64.844	77.916	126.204	153.360

## 2. Struktur PDRB tanpa Migas menurut Lapangan Usaha Triwulan II Tahun 2009

Terdapat beberapa perbedaan struktur bila dibandingkan dengan struktur ekonomi dengan migas. Struktur PDRB tanpa migas disajikan pada Tiga sektor utama terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tiga sektor tersebut bertahan pada setiap periode, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian justru menempati posisi kedelapan dari sembilan sektor penyusun PDRB. Perekonomian Riau tanpa migas pada triwulan II tahun 2009 mencapai sebesar Rp 43.131,11 milyar. Kontribusi terbesar sektoral pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 34,64 persen, diikuti sektor industri pengolahan 28,28 persen, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 13,95 persen, yang bila dijumlahkan, peran ketiganya mencapai 65,22 persen. Sementara sektor yang memiliki kontribusi terendah masih sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 0,30 persen. Dibandingkan dengan triwulan II tahun 2008, pada triwulan II tahun 2009 terjadi pergeseran peran di beberapa sektor ekonomi. Beberapa sektor yang kontribusinya mengalami kenaikan, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor pertambangan dan penggalian, serta pertambangan dan penggalian, sedangkan kontribusi sektor lainnya mengalami penurunan. Sektor yang banyak mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 12,71 persen menjadi 13,95 persen, atau meningkat sebesar 1,24 persen. Sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,55 persen, sektor bangunan meningkat sebesar 0,51 persen,serta sektor pertambangan dan penggalian meningkat sebesar 0,40 persen.

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau mempunyai PDRB yang sangat besar, daerah-daerah ini dapat dianggap sebagai daerah kantong. Dukungan utama PDRB daerah-daerah kantong terutama berasal dari minyak dan gas. Produksi migas di Provinsi Riau terutama terpusat di tiga kabupaten; Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kurun 2003-2009 rata-rata kontribusi ketiga kabupaten ini lebih dari 55% persen total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis memiliki PDRB terbesar. Nilai PDRB Kabupaten Bengkalis termasuk migas atas dasar harga berlaku dalam kurun 2003-2009 rata-rata 52.781 miliar rupiah atau 27,83 persen dari total 11 kabupaten/kota. Pada tahun 2009 sendiri, Kabupaten Bengkalis memiliki nilai PDRB sebesar 88.732 miliar rupiah atau 27,87 persen dari total 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kabupaten terbesar berikutnya adalah Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir dengan rata-rata nilai PDRB berturut-turut 30.670 miliar rupiah dan 21.029 miliar rupiah dalam kurun 2003-2009 atau berturut-turut menyumbang rata-rata 16,33 persen dan 11,32 persen dari total 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pada tahun 2009 sendiri, kedua kabupaten ini berturut-turut memiliki nilai PDRB sebesar 51.996 miliar rupiah dan 34.404 miliar rupiah atau 16,33 persen dan 10,81persen dari total 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sementara kabupaten yang memiliki PDRB terkecil adalah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Sengingi berturut-turut memiliki nilai PDRB rata-rata 6.231 miliar rupiah, 6.845 miliar rupiah, dan 7.089 miliar rupiah selama kurun 2003-2009 atau ketiganya masih di bawah 4 persen dari total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pada tahun 2009 sendiri, ketiga kabupaten/kota ini berturut-turut memiliki nilai PDRB sebesar 12.353 miliar rupiah , 10.761 miliar rupiah, dan 12.043 miliar rupiah atau ketiganya juga masih di bawah 4 persen dari total 11 kabupaten/kota. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dalam kurun 2003-2009, Kota Pekanbaru memiliki PDRB terbesar. Dalam kurun waktu ini nilai rata-rata PDRB Kota Pekanbaru sebesar 18.031 miliar rupiah atau 17,35 persen dari total PDRB kabupaten/kota. Pada tahun 2009 sendiri nilai PDRB Kota Pekanbaru memiliki sebesar 30.488 miliar rupiah.

Kabupaten terbesar berikutnya adalah Indragiri Hilir dengan nilai PDRB rata-rata sebesar 13.040,55 miliar rupiah dalam kurun 2003-2009 atau 12,41 persen dari total PDRB kabupaten/kota. Pada tahun 2009 sendiri nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 22,447 miliar rupiah atau 12,61 persen dari total PDRB kabupaten/kota pada tahun yang sama. Setelah Kabupaten Indragiri Hilir terbesar berikutnya adalah Kabupaten Siak dan Bengkalis dengan rata-rata nilai PDRB masing-masing sebesar 11 miliar rupiah lebih atau 10 persen dari total PDRB 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sementara kabupaten/kota dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas yang terkecil juga adalah Kota Dumai rata-rata 3.094 miliar rupiah dalam kurun 2003-2009 atau 2,99 persen dari total PDRB kabupaten/kota.

#### **D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari pembahasan yang telah di jelaskan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan disentralisasi fiskal mampu membawa tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi beberapa Kabupaten di Provinsi Riau seperti Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini disebabkan di Kabupaten-kabupaten tersebut terdapat sumber minyak dan gas.
2. Untuk Kabupaten-kabupaten yang tidak mempunyai sumber minyak dan gas masih pertumbuhan ekonomi masih di topan oleh sector pertanian dan perkebunan.

Sedangan hal-hal yang patut di rekomendasikan adalah:

Pemerintah daerah Provinsi Riau hendaknya mampu mengoptomalkan momentum kebijakan disentralisasi fiskal yang mendorong pertumbuhan perekonomian yang tinggi guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Bagi Kabupaten yang tidak mempunyai sumber minyak dan gas pemerintah daerah Provinsi Riau hendaklah memeperhatikan sector ekonomi seperti pertanian dan perkebunan sebagai basis ekonomi. Kebijakan di sector pertanian dan perkebunan dapat berupa subsidi bibit, pupuk, pelatihan serta permodalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, STIE YKPN, Yogyakarta
- Dahuri, Rokhim. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Jhingan, M, L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Mackie, J.A.C. 2000. *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern*, Pembangunan, Jakarta.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, 2001. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, LPFE-UI, Jakarta.
- Riyadi dan Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama IKPI, Jakarta.
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Rineka Cipta
- Syafrijal. 2008. *Ekonomi Regional*, Baduose Media, Padang-Sumatera Barat
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta.
- ..... 2002. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional*, Bumi Aksara, Jakarta